

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sustainability

Sustainability adalah memperhatikan akibat yang disebabkan oleh kegiatan yang dilakukan sekarang namun tetap memperhatikan kebutuhan dimasa mendatang. Awal mula dari setiap pengertian dari *sustainability* berasal dari *Brundtland report* yang dipublikasikan pada tahun 1987. Laporan ini sebenarnya berjudul “*Our common future which produce was produce by world commission environment*”. Dari laporan tersebut muncul beberapa konsep turunan yang salah satunya adalah konsep *triple bottom line*. Konsep ini membagi *sustainability* kedalam tiga aspek yang dibutuhkan untuk pengembangan yang berkelanjutan. Tiga aspek tersebut adalah *economic, social, dan environment* (David Crowther dan Shala Seifi,2011: 46).

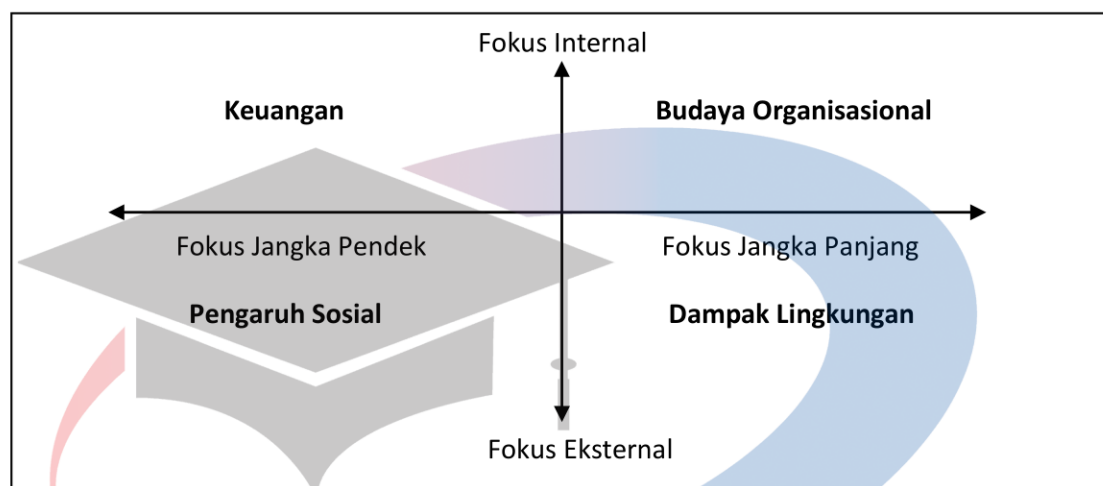
Selain itu, *sustainability* juga dapat dibedakan atas komponen aktivitas keberlanjutannya yaitu :

- 1) Pengaruh sosial (*Social Influence*), dimana dapat diartikan sebagai pengukuran dampak yang dibuat masyarakat terhadap perusahaan dalam hal kontrak sosial dan dampak terhadap *stakeholder*.
- 2) Dampak lingkungan (*Environmental Impact*), yang dapat diartikan sebagai akibat yang muncul dari aktivitas perusahaan pada lingkungannya.
- 3) Budaya organisasi (*Organisational Culture*), yang dapat diartikan sebagai hubungan antara perusahaan dan *stakeholder* internalnya, karyawan, dan seluruh aspek-aspek yang berhubungan.
- 4) Keuangan (*Finance*) yang dapat diartikan sebagai hasil yang diperoleh yang sepadan terhadap tingkat resiko yang diambil (David Crowther dan Shala Seifi,2011: 50).

Keempat hal tersebut dibutuhkan untuk memastikan terciptanya *sustainability* dan terlebih lagi pernyataan tersebut menyeimbangkan aspek-aspek yang ada yang merupakan faktor yang sangat krusial. Keempat hal tersebut dianggap sebagai kunci atau dimensi dari *sustainability* yang sama-sama penting. Analisis tersebut juga dianggap lebih luas dan lengkap dari analisis yang lain. Aspek-aspek tersebut

kemudian juga dapat dibagi atas dua dimensi matrix dan polaritas yaitu berupa fokus internal & eksternal dan fokus jangka panjang & jangka pendek. Model tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Dimensi Aspek Sustainability



Sumber : David Crowther dan Shala Seifi,2011: 50

Dari gambar tersebut dapat diartikan :

- 1) Memelihara aktivitas ekonomi dimana merupakan tujuan utama dari aktivitas perusahaan hal ini merupakan aspek finansial
- 2) Konservasi lingkungan dimana merupakan hal yang esensial untuk memelihara ketersediaan untuk generasi yang akan datang, hal ini merupakan aspek dampak lingkungan
- 3) Memastikan keadilan sosial termasuk kegiatan seperti memberantas kemiskinan, mengutamakan hak asasi manusia, memajukan pendidikan dan membantu mewujudkan kedamaian dunia, hal ini merupakan aspek pengaruh sosial
- 4) Mengembangkan spiritualitas dan nilai budaya dimana perusahaan dan nilai sosial disesuaikan dan elemen-elemen lainnya dikembangkan atau ditiadakan, hal ini merupakan aspek budaya organisasi (David Crowther dan Shala Seifi,2011: 50-51).

Sustainability berhubungan erat dengan *going concern* perusahaan dimana konsep keberlanjutan ini membagi fokus perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan timbul baik jangka pendek ataupun jangka panjang, sehingga

perusahaan dapat mengantisipasi dampak yang dihasilkan dari permasalahan tersebut dikemudian hari.

2.1.2 Sustainability Report

Sustainability report atau laporan keberlanjutan menurut GRI adalah sebuah laporan yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi tentang dampak ekonomi, lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh kegiatan sehari-hari. Sebuah laporan keberlanjutan juga menyajikan nilai-nilai dan tata kelola model organisasi, dan menunjukkan hubungan antara strategi dan komitmennya untuk ekonomi global yang berkelanjutan. Pelaporan keberlanjutan dapat dianggap sebagai sinonim dengan istilah lain untuk pelaporan non-keuangan; tiga pelaporan *bottom line*, perusahaan tanggung jawab sosial (CSR) pelaporan, dan banyak lagi (www.globalreporting.org/information/sustainability-reporting).

Pengungkapan *sustainability report* saat ini telah berkembang di seluruh dunia dan telah menjadi pengungkapan wajib di beberapa negara. Bersamaan dengan peraturan pemerintah dan jumlah saham yang terdaftar, cepat atau lambat *sustainability report* akan menjadi kewajiban dalam perusahaan *go public*. Untuk itu, perusahaan yang berniat untuk melakukan pengungkapan *sustainability*, harus memahami untuk siapa pengungkapan tersebut akan bermanfaat dan mengidentifikasi informasi yang akan bermanfaat untuk pengguna laporan. Berdasarkan hal tersebut, akan lebih baik jika perusahaan memilih kerangka pengungkapan keberlanjutan (Francis Quinn, Elizabeth Ewing dan Mike Sellberg, 2013:4).

Kerangka pelaporan keberlanjutan di Amerika Serikat adalah Sustainability Accounting Standard Board (SASB). Pelaporan melalui kerangka pelaporan ini tidak memberikan ketertarikan kepada stakeholder seperti perkerja dan serikat pekerja, namun pelaporan ini dibuat lebih kepada *stakeholder* finansial. Bertolak berlawanan dengan standar SASB, *Global Reporting Initiative (GRI) Guideline* menggunakan pendekatan *multi-stakeholder* yang terdiri dari tenaga kerja, investor, dan masyarakat luas, dan sama halnya dengan bisnis (Francis Quinn, Elizabeth Ewing dan Mike Sellberg, 2013:5).

Pedoman pembuatan *sustainability report* berdasarkan pedoman yang dibuat oleh GRI saat ini adalah *G4 Guidelines*. Dalam G4 terdapat tiga aspek utama yang harus diungkapkan dalam pelaporan *sustainability report* yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial. Untuk memenuhi syarat dalam pelaporan *sustainability report* maka perusahaan perlu memahami prinsip-prinsip pelaporan yaitu :

- 1) Pelibatan pemangku kepentingan, yaitu perusahaan harus mengidentifikasi para pemangku kepentingannya dan menjelaskan bagaimana organisasi telah memenuhi harapan dan kepentingan wajar mereka
- 2) Konteks keberlanjutan, yaitu perusahaan harus menyajikan kinerja perusahaan dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas
- 3) Materialitas, yaitu laporan harus mencakup aspek dampak ekonomi, lingkungan dan sosial yang signifikan dari organisasi atau secara substansial memengaruhi asesmen dan keputusan pemangku kepentingan
- 4) Kelengkapan, yaitu laporan harus berisi cakupan aspek material dan *boundary*, cukup untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan, serta untuk memungkinkan pemangku kepentingan dapat menilai kinerja organisasi dalam periode pelaporan (Pedoman Keberlanjutan GRI G4, 2013:16-17).

Pedoman pengungkapan *sustainability report* berdasarkan GRI lebih sesuai dengan konsep *sustainability* hal ini dikarenakan pedoman pengungkapan yang berdasarkan GRI lebih sesuai dengan konsep awal *sustainability* dalam *Brundtland report*. *Sustainability report* juga merupakan salah satu cara perusahaan untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh stakeholder yang beragam.

2.1.3 Kinerja Keuangan

a. *Return of Asset (ROA)*

Return of Asset (ROA) adalah rasio untuk mengukur tingkat pengembalian aktiva setelah beban bunga dan pajak (Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston, 2006:109). ROA merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan. Perhitungan ROA berfokus pada hubungan pendapatan dengan aset dalam hal ini adalah mengenai seberapa besar pendapatan yang

diperoleh dari penggunaan aset yang dimiliki (Larry M. Walter dan Christopher J. Skousen,2009:13).

ROA adalah alat yang penting dalam mengarahkan kegiatan sehari-hari perusahaan. Rasio ini menyediakan suatu tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai semua kegiatan operasi (Ciaran Walsh,2003:66). ROA merupakan sebuah pengukuran efisiensi yang relevan karena nilai ini mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva yang diberikan pada perusahaan dengan kata lain tidak membedakan pengembalian berdasarkan sumber pendanaannya seperti hutang karena total aktiva adalah sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Dengan menghilangkan dampak sumber pendanaan aktiva, analisis dapat lebih terpusat pada evaluasi dan peramalan kinerja operasi (Jhon J. Wild, K. R. Subramanyam, dan Robert F. Halsey, 2005:186).

ROA dihitung melalui perbandingan antara laba operasi setelah dikurangkan biaya operasi dengan angka total aktiva yang ada di neraca. Kaitan di antara keduanya, dinyatakan dalam presentase, yang akan memberikan tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh total aktiva. Oleh karena itu, rasio ini mengukur seberapa baik manajemen menggunakan semua aktiva untuk menghasilkan surplus operasi. Rumus untuk menghitung *return of asset* perusahaan adalah:

$$\text{Return of Asset} : \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aktiva}}$$

(Arief Habib,2008:60)

ROA pada perusahaan sering dikaitkan dengan kinerja operasi perusahaan sehingga sering menjadi salah satu aspek yang diperhatikan oleh para investor dan calon investor dalam menilai perusahaan. Hal ini membuat rasio ROA merupakan salah satu rasio penting dalam menilai kinerja keuangan perusahaan.

b. *Net Profit Margin* (NPM)

Net Profit Margin (NPM) adalah ukuran profitabilitas perusahaan dari penjualan setelah memperhitungkan semua biaya dan pajak penghasilan. Rasio ini memberitahukan laba dari perusahaan berhubungan dengan penjualan setelah dikurangi biaya untuk memproduksi barang yang dijual. Rasio ini merupakan pengukur efisiensi operasi perusahaan, serta merupakan indikasi dari cara produk ditetapkan harganya Perusahaan dengan nilai NPM yang tinggi menunjukkan bahwa

perusahaan mampu mengelola beban perusahaan dengan efektif dan efisien hal ini dikarenakan laba merupakan pendapatan setelah dikurangi dengan beban (James C. Van Horne dan John M. Wachowicz, jr, 2012:181-182). Sehingga NPM yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu memperoleh laba dengan jumlah beban yang lebih sedikit (Jhon J. Wild, K. R. Subramanyam, dan Robert F. Halsey, 2005:73-76). Penurunan NPM mengindikasikan ketidakefisienan operasi perusahaan dan manajemen yang buruk yang akan meningkatkan resiko finansial perusahaan jika penjualan mengalami penurunan (Matthew T. Brown, Daniel A. Rascher, Mark S, Nagel, Chad M. McEvoy,2013,51).

Rasio NPM mengukur laba bersih per nilai rupiah penjualan, yang dihitung dengan membagi laba bersih dengan penjualan (Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston, 2006:107). NPM di sajikan dalam bentuk persen, yang menunjukkan persentase dari penjualan yang dikembalikan pada pemilik perusahaan dalam bentuk laba bersih atas modal mereka (Matthew T. Brown, Daniel A. Rascher, Mark S, Nagel, Chad M. McEvoy,2013,51). Rumus untuk menghitung *net profit margin* perusahaan adalah:

$$\text{Net Profit Margin} : \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Penjualan}}$$

(Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston,2006:107)

NPM merupakan rasio yang mengukur keefisienan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui penjualan. Salah satu cara menaikkan laba selain menaikkan penjualan adalah mengelola keefisienan beban. Perusahaan yang mampu mengelola beban secara efisien turut berperan serta dalam penghematan sumber daya alam untuk menciptakan keberlanjutan.

c. **Current Ratio (CR)**

Current Ratio (CR) adalah rasio untuk mengukur tingkat pengembalian kewajiban lancar perusahaan melalui aktiva likuid yang dimiliki perusahaan. Aktiva likuid atau aktiva lancar adalah aktiva yang dapat diubah menjadi kas dengan cepat tanpa harus terlalu jauh menurunkan nilai aktiva tersebut. Aktiva lancar umumnya meliputi kas, sekuritas, piutang usaha dan persediaan. Kewajiban lancar terdiri atas utang usaha, wesel tagih jangka pendek, utang jatuh tempo yang kurang dari satu tahun, akrual pajak, dan beban-beban akrual lainnya (Eugene F. Brigham dan Joel F.

Houston, 2006:95). Kewajiban lancar memberikan indikasi kebutuhan kas dimasa yang akan datang. Institusi-institusi pemberi pinjaman berharap menghasilkan surplus kas yang positif. Untuk itu, dibutuhkan nilai CR yang lebih tinggi agar perusahaan mendapat kepercayaan dari kreditor (Ciaran Walsh, 2003: 106).

Current Ratio disebut juga dengan rasio likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah aktiva menjadi kas atau kemampuan untuk memperoleh kas. Pentingnya likuiditas bagi perusahaan dapat dilihat ketika perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang rendah. Likuiditas yang rendah menunjukkan perusahaan kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kurangnya likuiditas menghalangi perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Hal ini juga berarti pembatasan kesempatan dan tindakan manajemen. Masalah likuiditas yang lebih parah menunjukkan perusahaan tidak mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Masalah ini dapat mengarah pada penjualan investasi dan aktiva dengan terpaksa, dan dalam bentuk yang lebih parah, mengarah pada insolvensi dan kebangkrutan (Jhon J. Wild, K. R. Subramanyam, dan Robert F. Halsey, 2005:186). Rumus untuk menghitung *current ratio* perusahaan adalah:

$$\text{Current Ratio} : \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Kewajiban lancar}}$$

(Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston,2006:95)

Likuiditas merupakan hal yang cukup krusial pada perusahaan, hal ini dikarenakan kegiatan sehari-hari perusahaan seperti beban operasional dan pembayaran hutang jangka pendek sangat bergantung pada likuiditas perusahaan. Masalah likuiditas dapat membawa masalah yang jauh lebih besar dikemudian hari walaupun masalah likuiditas dapat bersifat sementara namun juga merupakan hal sangat yang diperhatikan oleh stakeholder.

d. *Debt to Equity Ratio (DER)*

Debt to equity ratio (DER) adalah salah satu rasio untuk mengukur tingkat *leverage* perusahaan. *Leverage* perusahaan menunjukkan seberapa besar bagian ekuitas perusahaan yang diperoleh melalui hutang, atau seberapa besar jaminan yang diperoleh kreditor dengan melihat proporsi ekuitas dengan hutang yang akan diberikan (Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston,2006:101). Tujuan dari rasio ini adalah untuk mengukur bauran dana dalam neraca dan membuat perbandingan antara

dana yang diberikan oleh pemilik (ekuitas) dan dana yang dipinjam (hutang). Hutang dalam definisi dari institusi keuangan seperti bank memiliki dua pengertian yaitu hutang jangka panjang saja dan semua hutang yang berbunga. Dua definisi tersebut mencakup hutang yang berasal dari bank atau institusi keuangan lain. Alasan mengapa bank memiliki pandangan atas hutang yang lebih sempit adalah karena tingkat klaim mereka biasanya lebih tinggi dari hutang dari kreditor dagang dan pihak lainnya. Sedangkan dalam sisi perusahaan, hutang kepada pemasok adalah hutang riil dan sama pentingnya dengan hutang kepada kreditor (Ciaran Walsh, 2003:120).

Umumnya kreditor tidak akan memberikan dana tanpa adanya perlindungan dari pendanaan ekuitas. *Leverage* perusahaan mengacu pada jumlah pendanaan hutang dalam struktur modal perusahaan. Perusahaan dengan *leverage* keuangan disebut memperdagangkan ekuitas (*trading on the equity*). Hal ini menunjukkan perusahaan menggunakan modal ekuitas sebagai dasar pinjaman dengan tujuan meraih kelebihan pengembalian (Jhon J. Wild, K. R. Subramanyam, dan Robert F. Halsey, 2005:213).

Tingkat DER yang besar juga beresiko menurunkan nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan apabila tingkat bunga yang besar akan menurunkan laba sehingga mempengaruhi ekuitas perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan akan cenderung berhati-hati dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan manfaat yang dapat diterima. Keputusan akan penggunaan hutang mengharuskan perusahaan menyeimbangkan tingkat ekspektasi pengambilan yang lebih tinggi dengan resiko yang meningkat (Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston, 2006:103). Rumus untuk menghitung DER adalah :

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} : \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Ekuitas}}$$

(Mohamad Samsul, 2006:146)

DER perusahaan yang tinggi membuat perusahaan harus melakukan perencanaan yang baik baik secara jangka panjang yaitu pelunasan hutang, maupun jangka pendek yaitu beban bunga yang harus dibayar. Hal ini sering membuat perusahaan menjadi *profit oriented* karena tuntutan kewajiban yang masih harus dibayar pada kreditor.

e. *Inventory Turnover Ratio*

Persediaan sering kali merupakan bagian aktiva lancar yang cukup besar. Persediaan merupakan investasi yang dibuat untuk tujuan memperoleh pengembalian melalui penjualan kepada pelanggan. Sebagian perusahaan mempertahankan tingkat persediaan tertentu. Jika persediaan tidak cukup, volume penjualan akan turun dibawah tingkat yang dapat dicapai. Sebaliknya jika persediaan terlalu banyak akan menambah biaya penyimpanan, asuransi, pajak, keusangan dan kerusakan fisik (Jhon J. Wild, K. R. Subramanyam, dan Robert F. Halsey, 2005:213).

Perputaran persediaan yang cepat menandakan bahwa perusahaan mempunyai kinerja yang baik dan produktif. Hal ini dikarenakan perusahaan dapat dengan segera menjual persediaan yang ada sehingga tidak menimbulkan biaya-biaya terhadap persediaan. Semakin tinggi perputaran persediaan, maka dapat diasumsikan bahwa laba bruto akan meningkat. (Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston, 2006:97)

Perusahaan yang baik akan meminimalkan investasi pada persediaan. Persediaan yang ada akan menimbulkan biaya namun persediaan yang kurang akan menyebabkan perusahaan kehilangan *customer*, sehingga dibutuhkan keseimbangan dalam pengendalian persediaan. *inventory turnover ratio* atau rasio perputaran persediaan sering digunakan sebagai pengukuran dalam pengendalian persediaan. Rasio perputaran persediaan menunjukkan jumlah keseimbangan persediaan yang terjual dalam satu tahun (Larry M. Walther dan Christopher J. Skousen, 2009:95).

Rumus untuk menghitung *inventory turnover* perusahaan adalah :

$$\text{Inventory Turnover} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Persediaan}}$$

(Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston, 2006:97)

Perputaran persediaan pada perusahaan berkaitan dengan berbagai hal seperti bagaimana perusahaan memperoleh persediaan sehingga perusahaan tidak kekurangan persediaan dan juga keefisienan perusahaan dalam mengelola persediaan sehingga tidak menimbulkan biaya penyimpanan yang besar.

f. *Dividend Payout Ratio (DPR)*

Perusahaan yang besar dapat memiliki jumlah pembayaran dividen yang lebih besar daripada perusahaan yang lebih kecil, namun saham publik yang dimiliki oleh

perusahaan besar juga dapat lebih banyak dari pada perusahaan yang kecil. Untuk itu diperlukan sebuah pengukuran untuk mengukur tingkat pengembalian investasi pada investor yang dapat digunakan untuk membandingkan tingkat pengembalian pada setiap perusahaan (Larry M. Walter dan Christopher J. Skousen, 2009:16).

Dividend payout ratio (DPR) adalah rasio yang digunakan untuk melihat tingkat pembayaran dividen per lembar saham yang diterima investor dibandingkan dengan tingkat laba per lembar saham. Banyak perusahaan yang tidak membayarkan dividen dikarenakan perusahaan tidak memiliki dana lebih. Namun hal ini biasanya dikarenakan perusahaan membutuhkan dana untuk kegiatan operasional maupun untuk perluasan usaha. Namun pada perusahaan yang *profitable* dan lebih mapan, dapat mengembangkan usaha mereka dan juga dapat membayarkan dividen kepada *shareholder* mereka (Larry M. Walter dan Christopher J. Skousen, 2009:21).

Berdasarkan teori “*The Bird in the Hand*” perusahaan dengan tingkat DPR yang rendah akan menyebabkan biaya modal sendiri perusahaan akan naik. Hal ini dikarenakan investor lebih senang menerima dividen dari pada *capital gain*. Hal ini dikarenakan investor menilai bahwa dividen *yield* lebih pasti dari pada *capital gain yield*. Hal ini akan mendorong investor untuk menginvestasikan dividen mereka kepada perusahaan yang sama atau perusahaan dengan tingkat resiko yang sama. Hampir sama dengan teori *the bird in the hand*, teori *signaling hypothesis* juga menyatakan bahwa investor lebih menyukai dividen dari pada *capital gain* hal ini dikarenakan kenaikan dividen merupakan sinyal dari perusahaan bahwa perusahaan meramalkan suatu penghasilan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Sebaliknya penurunan tingkat dividen ataupun pembayaran dividen dibawah tingkat normal meramalkan bahwa perusahaan akan mengalami kesulitan dimasa yang akan datang (Lukas Setia Atmaja, 2008:287). Rumus untuk menghitung *dividend payout ratio* adalah:

$$\text{Dividend Payout Ratio} : \frac{\text{Dividen kas tahunan yang dibayarkan}}{\text{Laba per saham}}$$

(Larry M. Walter dan Christopher J. Skousen, 2009:22)

Dividend Payout Ratio merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar bagian laba per saham yang dibagikan dalam bentuk dividen kepada investor. Perusahaan yang memiliki tingkat *dividend payout ratio* yang rendah atau sama

sekali tidak membagikan dividen dianggap mempunyai kinerja yang buruk oleh investor karena hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak memiliki perencanaan yang baik untuk mengatasi masalah keuangan yang akan terjadi sehingga perusahaan mengurangi atau menunda dividen.

2.1.4 Karakteristik Perusahaan

2.1.4.1 Tipe Industri

Tipe industri dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu industri *high-profile* dan *low-profile*. Perusahaan *high-profile* adalah perusahaan yang lebih dikenal oleh masyarakat, mempunyai resiko politis tinggi, perusahaan yang mempunyai persaingan yang tinggi. Perusahaan yang termasuk dalam industri yang *high-profile* akan memberikan informasi sosial lebih banyak dibandingkan perusahaan yang *low-profile*. Hal ini dikarenakan perusahaan – perusahaan *high-profile* lebih mendapatkan tekanan dari luar seperti pemerintah dan masyarakat dibandingkan dengan perusahaan yang termasuk ke dalam *low profile* (David Hackston dan Markus J. Milne, 1997:87).

Industri yang termasuk kedalam tipe industri *high profile* adalah perusahaan dari sektor minyak bumi dan gas alam, kimia, kehutanan, pertambangan, otomotive, transportasi dan pertanian. Sedangkan sektor lain yang tidak disebutkan termasuk kedalam tipe industri *low profile* (David Hackston dan Markus J. Milne, 1997:88).

Perusahaan *high profile* umumnya adalah perusahaan yang memiliki peranan yang penting bagi masyarakat dan memainkan peran penting dalam kelangsungan operasional industri lainnya seperti industri hulu. Sedangkan perusahaan *low profile* umumnya adalah perusahaan industri yang bersifat hilir atau perusahaan yang kurang memberikan dampak dalam kegiatan operasional perusahaannya. Pengukuran perusahaan tipe industri dapat dilakukan dengan pengukuran yang kategorial yaitu dengan skor 1 untuk perusahaan yang tergolong kedalam tipe industri *high-profile* dan skor 0 untuk perusahaan yang tergolong kedalam tipe industri *low-profile*.

2.1.4.2 Ukuran Perusahaan

Perusahaan yang memiliki ukuran yang besar memiliki dampak sosial yang lebih besar daripada perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih kecil. Hal ini

menyebabkan perusahaan besar lebih mendapat perhatian dari media dibandingkan dengan perusahaan kecil. Selain itu, perusahaan besar juga mendapat desakan dari pihak eksternal terkait pertanggungjawaban sosial mereka, sehingga kebijakan *corporate social responsibility* (CSR) secara sukarela pun lebih efektif pada perusahaan besar dibandingkan pada perusahaan yang lebih kecil (Peter Challis dan Laura Challis, 2014:108).

Berdasarkan hal tersebut, perusahaan dengan ukuran yang besar memiliki tanggung jawab yang besar terhadap *stakeholder*, untuk memperoleh kepercayaan investor maka perusahaan cenderung akan melakukan pengungkapan yang lebih banyak agar seluruh informasi yang dibutuhkan *stakeholder* terpenuhi. Hal ini juga berkaitan dengan pandangan stakeholder tentang budaya organisasi (*Organisational Culture*) yang merupakan faktor yang penting untuk keselarasan aspek-aspek *sustainability* (David Crowther dan Shala Seifi, 2011: 50-51).

Ukuran perusahaan akan mempengaruhi perusahaan karena perusahaan yang besar secara otomatis mendapat perhatian yang lebih, baik dari pemerintah ataupun masyarakat terkait kegiatan operasionalnya. Hal ini dikarenakan perusahaan yang besar umumnya memiliki dampak yang besar bagi masyarakat seperti bagaimana perusahaan mengelola limbah yang dihasilkan, kontribusi perusahaan dalam menyediakan lowongan kerja untuk masyarakat, hingga dampak apa yang dihasilkan apabila perusahaan mengalami kegagalan atau bangkrut.

2.1.5 *Corporate Governance*

Menurut ketua Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), penerapan *good corporate governance* (GCG) dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika (*ethical driven*) datang dari kesadaran individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholders*, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Di sisi lain, dorongan dari peraturan (*regulatory driven*) “memaksa” perusahaan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua pendekatan ini memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing dan seyogyanya saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat (Pedoman Umum *Good Corporate* Indonesia, 2006:ii).

Berdasarkan KNKG, GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah:

1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*).
2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*social control*) secara obyektif dan bertanggung jawab (Pedoman Umum *Good Corporate* Indonesia,2006:3).

Dari ketiga hal di atas dapat disimpulkan bahwa peranan GCG tidak hanya sebatas internal perusahaan namun juga meliputi hampir seluruh aspek di masyarakat maupun pemerintah. Untuk mewujudkan GCG yang baik maka perusahaan perlu memperhatikan asas-asas GCG yang baik. Asas-asas GCG menurut KNKG adalah sebagai berikut :

1) Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar,

terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3) *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4) *Independensi (Independency)*

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5) *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)*

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (Pedoman Umum *Good Corporate Indonesia*,2006:5-7).

Apabila perusahaan telah dapat melaksanakan GCG secara baik, maka diharapkan akan terjadi keselarasan diantara berbagai kepentingan *stakeholder* yang berbeda-beda. GCG penting untuk diwujudkan dikarenakan perusahaan dengan GCG yang baik cenderung akan meningkatkan nilai perusahaan.

a. Dewan Komisaris

Berdasarkan KNKG, dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Adapun prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar pelaksanaan tugas dewan komisaris berjalan dengan baik adalah sebagai berikut :

- 1) Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.

- 2) Anggota dewan komisaris harus professional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
- 3) Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara (Pedoman Umum *Good Corporate* Indonesia, 2006:13).

Apabila keempat prinsip tersebut telah dilaksanakan dengan baik maka pengawasan dewan komisaris akan terlaksana dengan baik. Adapun fungsi pengawasan dewan komisaris menurut KNKG adalah sebagai berikut :

- 1) Dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kewenangan yang ada pada dewan komisaris tetap dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan penasihat.
- 2) Dalam hal diperlukan untuk kepentingan perusahaan, dewan direksi dapat mengenakan sanksi kepada anggota direksi dalam bentuk pemberhentian sementara, dengan ketentuan harus segera ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan RUPS.
- 3) Dalam hal terjadi kekosongan direksi atau dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar, untuk sementara dewan komisaris dapat melaksanakan fungsi direksi.
- 4) Dalam rangka melaksanakan fungsinya, anggota dewan komisaris baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri berhak mempunyai akses dan memperoleh informasi tentang perusahaan secara tepat waktu dan lengkap.
- 5) Dewan komisaris harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (charter) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja mereka.
- 6) Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh direksi, dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab dari RUPS
- 7) Dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris dapat membentuk komite sesuai dengan kebutuhan dan bagi perusahaan yang tercatat di bursa efek,

sekurang-kurangnya harus membentuk komite audit (Pedoman Umum *Good Corporate* Indonesia, 2006:13).

Keberadaan dewan komisaris dimaksudkan agar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan prinsip GCG yang baik tanpa intervensi dari pihak-pihak lain yang terkait. Dalam tugasnya dewan komisaris dapat membentuk komite-komite lain yang dimaksudkan untuk membantu dewan komisaris. Hal ini akan semakin mengarahkan perusahaan kepada GCG yang lebih baik.

Komisaris independen pada perusahaan diatur dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia No. Kep-305/BEJ/07-2004 yaitu proporsi komisaris independen pada perusahaan adalah minimal sebesar 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris independen. Proporsi komisaris independen dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Proporsi Jumlah Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Jumlah Anggota Dewan Komisaris}}$$

b. Dewan Direksi

Berdasarkan KNKG, direksi adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Meskipun masing-masing direksi memiliki tugas dan keputusan yang berbeda-beda berdasarkan pembagian tugas dan wewenangnya, namun pelaksanaan tugas dari masing-masing direksi merupakan tanggung jawab bersama. Adapun prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar tugas direksi dapat berjalan secara efektif yaitu:

- 1) Komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- 2) Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
- 3) Direksi bertanggungjawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (*profitability*) dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan.
- 4) Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pedoman Umum *Good Corporate Indonesia*, 2006:17).

Apabila keempat prinsip tersebut telah dilaksanakan dengan baik maka tugas dewan direksi pun dapat terlaksana dengan baik. Adapun lima tugas utama dewan direksi menurut KNKG adalah sebagai berikut :

- 1) Kepengurusan
- 2) Manajemen resiko
- 3) Pengendalian internal
- 4) Komunikasi
- 5) Tanggung jawab sosial (Pedoman Umum *Good Corporate* Indonesia, 2006:13).

Dalam melaksanakan tugasnya dewan direksi memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Direksi harus menyusun pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan dalam bentuk laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan, dan laporan pelaksanaan GCG.
- 2) Laporan tahunan harus memperoleh persetujuan RUPS, dan khusus untuk laporan keuangan harus memperoleh pengesahan RUPS.
- 3) Laporan tahunan harus tersedia sebelum RUPS diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memungkinkan pemegang saham melakukan penilaian.
- 4) Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota Direksi sejauh hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Direksi dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset perusahaan.
- 5) Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas GCG (Pedoman Umum *Good Corporate* Indonesia, 2006:19-20).

Dewan direksi mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan kepada *stakeholder*. Disamping itu seluruh pengungkapan yang disetujui dalam RUPS merupakan tanggung jawab dewan

direksi sehingga setiap pengungkapan yang dilakukan perusahaan harus dipertimbangkan dengan baik oleh dewan direksi. Kualitas dewan direksi dapat diukur secara kuantitatif dengan melihat jumlah seluruh anggota dewan direksi selama satu tahun.

c. Komite Audit

Menurut KNKG, komite audit merupakan komite yang terbentuk dibawah dewan komisaris yang bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam hal memastikan :

- 1) Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- 2) Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik.
- 3) Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.
- 4) Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (Pedoman Umum *Good Corporate* Indonesia, 2006:15).

Tanggung jawab dari komite audit antara lain :

- 1) Mengatur pelaporan keuangan dan proses pengungkapan
- 2) Mengawasi pemilihan prinsip-prinsip akuntansi
- 3) Menentukan pemilihan, performa dan independensi auditor eksternal
- 4) Mengawasi kepatuhan terhadap peraturan, etika dan *whistleblower hotlines*.
- 5) Memonitor proses pengendalian internal
- 6) Mengawasi kinerja internal
- 7) Mendiskusikan resiko kebijakan manajemen terhadap manajemen (David Crowther dan Shala Seifi, 2011: 81)

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan dalam membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Selain pengauditan, komite audit juga dapat mendiskusikan resiko kebijakan manajemen perusahaan kepada manajemen agar dapat menghindari resiko yang buruk untuk perusahaan. Untuk itu komite audit harus dapat memahami setiap resiko yang mungkin muncul dari kebijakan manajemen perusahaan. Kualitas komite audit dapat diukur secara kuantitatif dengan melihat jumlah seluruh anggota komite audit selama satu tahun.

d. *Governance Committee*

Komite kebijakan *Corporate Governance* bertugas membantu dewan komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun oleh direksi serta menilai konsistensi penerapannya, termasuk yang berkaitan dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Anggota komite kebijakan *corporate governance* terdiri dari anggota dewan komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan (Pedoman Umum *Good Corporate* Indonesia, 2006:16).

Governance committee bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi fungsi yang dijalankan dewan direksi, komunikasi antar dewan yang bersangkutan dan *good corporate governance* perusahaan sebagai badan yang bersifat objektif dan independen. *Governance committee* dimaksudkan untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan melalui *corporate governance* yang baik. Pengukuran *governance committee* dilakukan melalui pengukuran yang bersifat kategorial yaitu skor 1 untuk perusahaan yang membentuk *governance committee* dan skor 0 untuk perusahaan yang tidak membentuk *governance committee*.

2.2 Review Penelitian Terdahulu

Agus Azka (2013) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Sustainability Reporting Pada Perusahaan Peserta Sustainability Reporting Awards (ISRA) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh secara positif terhadap *sustainability report* sedangkan aktivitas dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *sustainability report*.

Fadhilla Adhipradhana (2013) melakukan penelitian dengan judul untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan (profitabilitas, likuiditas, rasio pembayaran deviden), ukuran perusahaan dan *corporate governance* (jumlah karyawan, komite audit, dewan komisaris, *governance committee*, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing) terhadap *sustainability report* pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode 2008-2011. Penelitian ini menunjukkan ukuran perusahaan, jumlah karyawan dan *governance committee* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Profitabilitas, likuiditas, rasio pembayaran

deviden, komite audit, dewan komisaris, kepemilikan manajemen, dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Hari Suryono dan Andri Prastiwi (2011) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap Praktik Pengungkapan Sustainability Report dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan (profitabilitas, likuiditas, leverage, aktivitas, ukuran perusahaan) dan *corporate governance* (komite audit, dewan direksi, *governance committee*) perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2009. Hasil penelitian menunjukkan profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit dan dewan direksi berpengaruh positif terhadap *sustainability report*. Sedangkan likuiditas, leverage, aktivitas dan *governance* tidak memiliki pengaruh terhadap *sustainability report*.

Mega Putri Yustia Sari (2013) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report untuk mengetahui pengaruh antara kinerja keuangan (profitabilitas, likuiditas, leverage, aktivitas), ukuran perusahaan dan *corporate governance* (komite audit, dewan direksi, komisaris independen) terhadap pengungkapan *sustainability report* yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) pada periode 2009-2011. Hasil penelitian menunjukkan komite audit dan dewan komisaris berpengaruh secara positif terhadap *sustainability report* sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *sustainability report*. Likuiditas, leverage, aktivitas perusahaan, dan dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*.

Puspowardhani melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap Publikasi Sustainability Report (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007 – 2011) untuk mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan dan *corporate governance* terhadap publikasi *sustainability report* pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2011 menunjukkan bahwa secara simultan, ROA, aktivitas, ukuran perusahaan, dan komite audit berpengaruh terhadap *sustainability report* sedangkan NPM, likuiditas, leverage, tipe industri, dewan direksi dan *governance committee* tidak berpengaruh terhadap *sustainability report*. Secara parsial, ROA, ukuran perusahaan, dan komite audit berpengaruh secara positif terhadap *sustainability report* sedangkan aktivitas berpengaruh negatif terhadap *sustainability*

report. NPM, likuiditas, leverage, tipe industri, dewan direksi, dan *governance committee* tidak berpengaruh terhadap *sustainability report*.

Tabel 2.1

Hasil Penelitian terdahulu

Nama Peneliti	Tahun	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil yang diperoleh
Agus Azka	2013	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Sustainability Reporting Perusahaan Sustainability Reporting (ISRA) Pada Peserta Awards	Variabel dependen : Sustainability report Variabel Independen : Likuiditas, Aktivitas, Profitabilitas	Secara parsial : a Secara positif Likuiditas berpengaruh terhadap sustainability report. b Aktivitas dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap sustainability report.
Fadhilla Adhipranha	2013	Pengaruh Kinerja Keuangan, Perusahaan, Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report (Studi Empiris Perusahaan-Perusahaan yang Listed (Go-Public) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2008-2011)	Variabel dependen : Pengungkapan Sustainability Report Variabel independen : Profitabilitas, Likuiditas, Rasio Pembayaran Dividen, Total Aset, Total Karyawan, Komite Audit, Dewan Komisaris, Governance Committee, Kepemilikan Manajemen, dan Kepemilikan asing	Secara parsial : a Secara positif total aset, total karyawan, dan <i>governance committee</i> berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> . b Profitabilitas, likuiditas, rasio pembayaran dividen, komite audit, dewan komisaris, kepemilikan manajemen dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> .

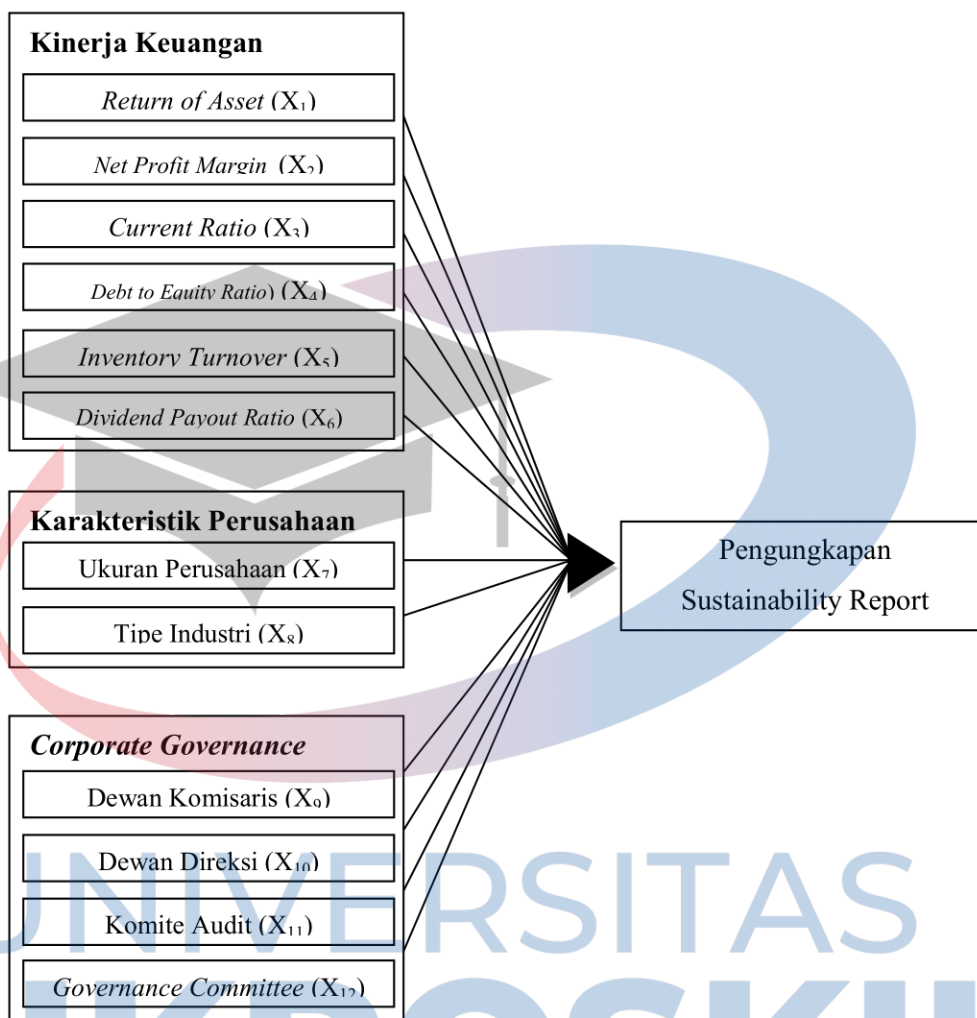
Nama Peneliti	Tahun	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil yang diperoleh
Hari dan Prastiwi	Suryono Andri	2011	Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap Praktik Pengungkapan Sustainability Report.	<p>Variabel Dependen : Sustainability Report</p> <p>Variabel independen : Profitabilitas (ROA), Likuiditas (CR), Leverage (DER), Aktivitas (ITO), Ukuran perusahaan, Komite Audit, Dewan Direksi, Governance Committee</p> <p>Secara parsial :</p> <p>a Secara positif ROA, ukuran perusahaan, komite audit, dan dewan direksi berpengaruh terhadap sustainability report.</p> <p>b Likuiditas, leverage, aktivitas dan governance comitee tidak berpengaruh terhadap sustainability report.</p>
Mega Yustia Sari	Putri	2013	Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report	<p>Variabel dependen : Sustainability Report</p> <p>Variabel independen : Profitabilitas (ROA), Likuiditas (CR), Leverage (DER), Aktivitas (ITO), Ukuran perusahaan, Komite Audit, Dewan Direksi, Komisaris Independen.</p> <p>Secara Parsial :</p> <p>a Secara positif Komite audit dan dewan komisaris berpengaruh terhadap sustainability report</p> <p>b Secara negatif Profitabilitas berpengaruh terhadap sustainability report.</p> <p>c Likuiditas, leverage, aktivitas, ukuran perusahaan, dan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap sustainability report</p>

Nama Peneliti	Tahun	Judul	Variabel yang digunakan	Hasil yang diperoleh
Pusphowardhani	2013	Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap Publikasi Sustainability Report (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007 – 2011)	Variabel dependen : Sustainability Report Variabel independen : Profitabilitas (ROA & NPM), Likuiditas (CR), Leverage (DER), Aktivitas (ITO), Ukuran perusahaan, Komite Audit, Dewan direksi, dan Governance Committee	Secara parsial : a. Secara positif ROA, ukuran perusahaan dan komite audit berpengaruh terhadap sustainability report b. Secara negatif aktivitas berpengaruh terhadap sustainability report dan c. Variabel NPM, likuiditas, leverage, tipe industri, dewan direksi dan governance committee tidak berpengaruh terhadap sustainability report.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dari penjelasan kajian teoritis dan penelitian-penelitian terdahulu maka yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah ROA, NPM, CR, DER, ITO, *Dividen Payout Ratio*, Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan *Governance Committee* sebagai variabel independen dan pengungkapan *Sustainability Report* sebagai variabel dependen. Variabel independen diasumsikan berpengaruh terhadap variabel dependen. Maka kerangka pemikiran yang terbentuk adalah sebagai berikut.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Return on Asset* (ROA) Terhadap Pengungkapan *Sustainability report*

Perusahaan dengan ROA yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan setiap aktiva yang dimiliki dalam memperoleh laba secara efektif dan efisien (Jhon J. Wild, K. R. Subramanyam, dan Robert F. Halsey, 2005:186). Kinerja keuangan yang baik akan mengarah pada performa di masa yang akan datang (keberlanjutan) dan hal ini akan mempengaruhi kebijakan perusahaan dimasa yang akan datang (David Crowther dan Shahla Seifi, 2011:42). Perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik cenderung lebih banyak mengungkapkan informasi kepada

stakeholder dibandingkan dengan perusahaan dengan kondisi kinerja keuangan yang buruk. Hal ini dikarenakan adanya kepentingan pemilik perusahaan dalam memenuhi harapan *shareholder* terhadap kinerja perusahaan dan juga adanya dana lebih dari perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang bersifat sukarela demi memenuhi informasi yang dibutuhkan *stakeholder* (David Crowther dan Shahla Seifi, 2011:42), *sustainability report* sendiri merupakan pengungkapan yang dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan informasi *stakeholder*. Oleh karena itu hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: ROA berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

2.4.2 Pengaruh *Net Profit Margin* (NPM) Terhadap Pengungkapan *Sustainability report*

Perusahaan dengan NPM yang tinggi menandakan bahwa perusahaan cukup efisien dalam mengelola biaya-biaya perusahaan termasuk juga biaya-biaya untuk melakukan kegiatan GCG, sehingga perusahaan cenderung mengungkapkan pelaporan sukarela seperti *sustainability report*. Hal ini juga berkaitan dengan kinerja keuangan, bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik akan mendorong perusahaan mengungkapkan informasi karena telah memenuhi harapan investor (David Crowther dan Shahla Seifi, 2011:42).

Kinerja keuangan yang baik dalam hal ini NPM menunjukkan bahwa perusahaan memiliki pengelolaan biaya yang baik. Hal ini akan berpengaruh pada *sustainable* perusahaan. Keberlanjutan menjadi hal yang penting dalam bisnis dan harapan konsumen dan investor berkembang apabila perusahaan memberikan lebih banyak perhatian untuk isu-isu seperti lingkungan, dampak sosial dan tata kelola perusahaan (Francis Quinn, Elizabeth Ewing, dan Mike Sellberg, 2013:6). Oleh karena itu hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₂: NPM berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

2.4.3 Pengaruh *Current Ratio* (CR) Terhadap Pengungkapan *Sustainability report*

Perusahaan dengan CR yang baik menunjukkan bahwa perusahaan mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus mengganggu keuangan perusahaan. Perusahaan dengan CR yang rendah akan mengalami kesulitan dalam beroperasi karena ketidakmampuan dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Hal ini akan berdampak pada pembatasan kesempatan dan tindakan manajemen dalam hal ini dapat berarti pembatasan dalam melakukan pengungkapan yang tidak diwajibkan seperti *sustainability report* dikarenakan pengungkapan ini membutuhkan biaya sehingga akan semakin membebani perusahaan (Jhon J. Wild, K. R. Subramanyam, dan Robert F. Halsey, 2005:186). Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₃: CR berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

2.4.4 Pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) Terhadap Pengungkapan *Sustainability report*

Perusahaan dengan tingkat DER yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan dalam melunasi hutangnya. Hal ini menyebabkan perusahaan akan berfokus untuk melunasi hutangnya dan hanya mengeluarkan dana untuk pengeluaran perusahaan yang bersifat penting dan perlu (Jhon J. Wild, K. R. Subramanyam, dan Robert F. Halsey, 2005:186).

Pengungkapan *sustainability report* masih bersifat sukarela, perusahaan yang terdaftar di organisasi seperti Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA) pun masih belum konsisten dalam melakukan pengungkapan tersebut. Hal ini mungkin dikarenakan pengungkapan *sustainability report* akan mengeluarkan biaya yang membebani kegiatan perusahaan terlebih jika perusahaan memiliki masalah keuangan. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₄: DER berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

2.4.5 Pengaruh *Inventory Turnover Ratio* Terhadap Pengungkapan *Sustainability report*

Perputaran persediaan berkaitan erat dengan kemampuan perusahaan dalam melakukan penjualan dan juga memenuhi permintaan konsumen. Perusahaan dalam hal ini dilihat sebagai pemasok oleh konsumen, diharapkan untuk memberikan sejumlah besar informasi yang berkaitan dengan kinerja keberlanjutan pemasok pada berbagai isu, termasuk lingkungan, hak asasi manusia, sosial, dan tenaga kerja (Francis Quinn, Elizabeth Ewing, dan Mike Sellberg, 2013:8).

Perusahaan dengan tingkat perputaran persediaan yang baik akan berusaha untuk menarik perhatian stakeholder melalui pengungkapan informasi yang menunjukkan keberlanjutan operasional mereka. Pengungkapan *sustainability report* dapat menjadi salah satu cara perusahaan dalam menarik perhatian *stakeholder* maupun memenuhi kebutuhan informasi mereka dikarenakan *sustainability report* memfokuskan pelaporan pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dan hubungannya dengan keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₅: *Inventory Turnover* berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

2.4.6 Pengaruh *Dividend Payout Ratio (DPR)* Terhadap Pengungkapan *Sustainability report*

Pembayaran dividen perusahaan dapat menjadi indikator kesehatan keuangan perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat pembayaran dividen yang tinggi menggambarkan bahwa perusahaan memiliki *sustainable* yang baik dikarenakan perusahaan meramalkan suatu penghasilan yang lebih baik di masa yang akan datang (Lukas Setia Atmaja, 2008:287). Perusahaan dengan *dividen payout ratio* yang tinggi dapat dikatakan memiliki *sustainable* yang baik dan cenderung lebih diminati oleh investor sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas. Hal ini dikarenakan semakin banyak investor yang menggunakan *sustainability* sebagai suatu kriteria dalam berinvestasi (Francis Quinn, Elizabeth Ewing, dan Mike Sellberg, 2013:6).

Pengungkapan *sustainability report* merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan dalam menginformasikan *sustainable* perusahaan dalam hal meningkatkan kepercayaan investor. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₆: Dividend Payout Ratio berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

2.4.7 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Sustainability report*

Perusahaan yang memiliki ukuran yang besar memiliki hubungan yang luas dengan berbagai *stakeholder* dengan berbagai kepentingan yang berbeda. Melalui pengungkapan *sustainability report* diharapkan perusahaan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh setiap pemangku kepentingan baik dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan ukuran yang besar memiliki dampak yang lebih besar. Hal ini menyebabkan pengungkapan sukarela akan lebih efektif dilakukan pada perusahaan besar. Hal ini dikarenakan media lebih memperhatikan perusahaan besar sehingga pengungkapan informasi secara sukarela akan menjangkau *stakeholder* atau pengguna informasi yang lebih luas dari pada perusahaan kecil (Peter Challis dan Laura Challis, 2014:108). Berdasarkan hal tersebut, pengungkapan sukarela seperti *sustainability report* akan cenderung dilakukan oleh perusahaan besar. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₇: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

2.4.8 Pengaruh Tipe Industri Terhadap Pengungkapan *Sustainability report*

Perusahaan yang tergolong dalam tipe industry *high profile* lebih mendapat perhatian dari media dan juga mendapat tekanan dari pihak eksternal terkait tanggung jawab sosial mereka (David Hackston dan Markus J. Milne, 1997:87). Perusahaan *high-profile* juga memiliki pengaruh yang besar terhadap *stakeholder*. Semakin perusahaan yang mempunyai pengaruh yang besar semakin besar pula kekuatan *stakeholder* untuk memperoleh informasi yang spesifik mengenai perilaku

perusahaan (David Crowther dan Sahla Seifi,2011:41). Hal ini dikarenakan apabila perusahaan melakukan kelalaian dalam kegiatan operasionalnya maka dampak yang dihasilkan akan sangat besar bagi *stakeholder*. Untuk mendapatkan kepercayaan *stakeholder* perusahaan akan memberikan informasi yang transparan kepada *stakeholder* mengenai dampak yang mungkin dihasilkan dan juga cara perusahaan mengatasi hal tersebut.

Pelaporan mengenai dampak yang dihasilkan perusahaan dapat disajikan melalui pengungkapan *sustainability report*. Pengungkapan *sustainability report* yang didasarkan pada GRI memiliki penekanan pengungkapan informasi yang lebih luas terkait dampak lingkungan dan sosial yang dihasilkan perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₃: Tipe industri berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

2.4.9 Pengaruh Dewan komisaris Terhadap Pengungkapan *Sustainability report*

Salah satu prinsip yang harus dipenuhi dewan komisaris adalah dewan komisaris harus profesional dan memastikan direksi telah memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (Pedoman Good Corporate Indonesia,2006:13). Salah satu hal yang diperlukan oleh *stakeholder* adalah pengungkapan informasi yang sesuai. Kebutuhan informasi dari setiap *stakeholder* sangat beragam dan untuk itu perusahaan perlu mengidentifikasi kebutuhan informasi dari setiap pemangku kepentingan dan tersebut bukanlah suatu hal yang mudah (David Crowther dan Shahla Seifi, 2011:38-39).

Sustainability report dengan pedoman dari GRI disesuaikan dengan kenyataan bahwa kebutuhan informasi dari setiap pemangku kepentingan berbeda-beda, sehingga sangat sesuai untuk memenuhi kebutuhan informasi *stakeholder*. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₉: Komisaris independen berpengaruh terhadap *sustainability report* perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

2.4.10 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan *Sustainability report*

Dewan direksi adalah dewan yang bertanggungjawab penuh dalam mengelola perusahaan. Salah satu tugas dari dewan direksi adalah menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan dan memastikan kelangsungan usaha perusahaan (*going concern*). Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian dari tujuan perusahaan untuk mendapatkan citra yang baik. Perusahaan dengan citra yang baik akan mendapatkan kepercayaan dari *stakeholder* yang akan menuju kepada kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba (Peter Challis dan Laura Challis, 2014:114). Pengungkapan yang bersifat akuntabilitas dan transparan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepuasan *stakeholder* yang beraneka ragam (David Crowther dan Shahla Seifi, 2011:96). *Sustainability report* merupakan pengungkapan sukarela yang memang dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan informasi *stakeholder* yang beragam. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₁₀: Dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

2.4.11 Pengaruh Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Sustainability report*

Komite audit adalah komite independen yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan perusahaan dalam berbagai aspek. Komite audit juga dapat memberikan rekomendasi mengenai kebijakan manajemen dan juga memeriksa kelayakan pelaporan yang akan disampaikan oleh manajemen (David Crowther dan Shala Seifi, 2011: 81). Dalam hal ini komite audit harus memahami informasi apa saja yang perlu diungkapkan oleh perusahaan. Dengan kata lain, semakin berkualitas komite audit, maka semakin komite audit memahami makna strategis dari pengungkapan informasi dan apa saja yang dibutuhkan *stakeholder* secara luas (Suryono dan Prastiwi, 2011:11). Komite audit dapat merekomendasikan dewan pengurus untuk melakukan pengungkapan sukarela untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan *stakeholder*, dalam hal ini dapat berupa pengungkapan *sustainability report*. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₁₁: Komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

2.4.12 Pengaruh *Governance Committee* Terhadap Pengungkapan *Sustainability report*

Governance committee akan mendorong terwujudnya GCG yang baik pada perusahaan. Hal ini dikarenakan fokus utama dari *governance committee* sendiri adalah kinerja *corporate governance* (Pedoman Umum Good Corporate Indonesia, 2006:16). Salah satu cara mewujudkan GCG yang baik pada perusahaan adalah melalui pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Pengungkapan ini penting untuk bagi perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Perusahaan yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat akan meningkatkan nilai perusahaan (Peter Challis dan Laura Challis, 2014:60).

Salah satu rekomendasi yang dapat diberikan oleh *governance committee* dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan adalah melalui pengungkapan informasi sukarela. Salah satu bentuk pengungkapan sukarela yang sejalan dengan tanggung jawab sosial perusahaan saat ini adalah pengungkapan *sustainability report*. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₁₂: *Governance Committee* berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

UNIVERSITAS
MIKROSKIL